

# PEMBANGUNAN NASIONALISME INDONESIA DI TENGAH KEKUATAN KERAGAMAN BUDAYA: KASUS MENGUATNYA NASIONALISME PAPUA DALAM PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME

Oleh:

Darsono

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

Email: darsono\_fbs@uwks.ac.id

## Abstract

In the long history of multicultural ethnic nations (*ethno-nations*), Indonesian nationalism as a result of creating symbols in the context of nations-states is relatively new. Patterns of inter-ethnic relations, both stratified/vertical and segmentative/horizontal, often lead to conflict. So, the problem is how to build Indonesian nationalism in the diversity of the nation and culture into the four basic consensuses of Pancasila ideology, the 1945 Constitution, *Bhinneka Tunggal Ika*, and the Unitary State of the Republic of Indonesia. By following the concept of nationalism-constructive-multiculturalist, the development of Indonesian nationalism is faced with issues of ethnic and national relations and patterns of ethnic uniformity through authoritarian repression. Three important things were found in the Papua case, (1) there was a construction of essential-primordial elements as the national identity of the Papuan nation, (2) there were factors driving the development of the construction of the Papuan nation, and (3) the dynamics of the meaning of nationalism in the life of the Papuan people.

**Keywords:** *ethno-nation*, Indonesian nationalism, Papuan people, multiculturalism

## Abstrak

Dalam sejarah panjang bangsa-bangsa etnis (*ethno-nations*) yang multikultur, nasionalisme Indonesia sebagai hasil penciptaan simbol dalam kerangka negara-bangsa (*nations-state*) memang relatif baru. Pola hubungan antaretnis, baik yang stratifikatif/vertikal maupun yang segmentatif/horisontal, kerap melahirkan konflik. Permasalahannya adalah bagaimana membangun nasionalisme Indonesia dalam keragaman bangsa dan kultur yang dirajut dalam empat konsensus dasar Pancasila, UUD 1945, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan NKRI. Dengan mengikuti konsep berpikir nasionalisme-konstruktif-multikulturalis, pembangunan nasionalisme Indonesia dihadapkan pada persoalan relasi keetnisan dan kebangsaan dan pola penyeragaman etnis melalui represi otoritarian. Ditemukan tiga hal penting dalam kasus Papua, (1) terjadi konstruksi terhadap elemen esensial-primordial sebagai identitas nasional bangsa Papua, (2) terdapat faktor-faktor pendorong berkembangnya konstruksi bangsa Papua tersebut, dan (3) dinamika makna nasionalisme itu dalam kehidupan masyarakat Papua.

**Kata kunci:** *ethnonation*, nasionalisme Indonesia, bangsa Papua, multikulturalisme

## A. Pendahuluan

Indonesia memiliki sekitar 17.500-an pulau besar-kecil yang dihubungkan laut sehingga kaya komunitas etnis dan diversitas suku bangsa (Koentjaraningrat, 1993:1) serta kemajemukan kultur. Sebagai *multination-state*, Indonesia dibangun melalui beragam organisasi sosial etnis dengan keunikan dan karakteristik masing-masing, seperti wilayah geografis, keunikan sejarah, ras, budaya, agama, dan bahasa. Jadi, Indonesia sebagai bangsa (*nation*) dan sekaligus negara (*state*) tidak terbentuk secara alamiah, tetapi dipersatukan oleh semangat dan tekad untuk bersama dan bersatu, “tidak kurang, tidak lebih” (Magnis-Suseno, 1998). Tekad itu tumbuh dan berkembang melalui penciptaan simbol-simbol nasional Indonesia (Foulcher, 2000) dalam sejarah panjang pengalaman bersama yang sebagian merupakan sejarah penderitaan dan penindasan akibat kolonialisme yang kemudian melahirkan pengalaman perjuangan bersama demi kemerdekaan dan selanjutnya hidup dalam persatuan dan kesatuan dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* (Setjen MPR, 2013:19). Sedyawati (2008:46) menulis bahwa sebagai bangsa Indonesia yang multietnis dan multireligi maka motto *unity in diversity* adalah kunci penting menuju kebudayaan nasional Indonesia.

Meskipun memiliki akar sejarah yang panjang, nasionalisme Indonesia sebagai hasil penciptaan simbol adalah sesuatu yang relatif baru, sekitar awal abad kedua puluh dengan lahirnya organisasi nasional pertama bernama Boedi Oetomo (1908). Sumpah Pemuda yang diklaim sebagai salah satu simbol nasionalisme diikrarkan tahun 1928; sebuah kurun waktu yang relatif baru dibandingkan dengan berbagai kelompok etnis yang sejak lama ada. Sumpah Pemuda itu pun lahir dari kompromi berbagai perkumpulan keetnisan yang

didesak oleh kebutuhan bersama untuk bersatu. Kebutuhan dan semangat untuk bersatu dan bersama itu mengalahkan asal-usul keetnisan mereka, melupakan perbedaan dan keragaman, dan membayangkan kebesaran nasionalisme Indonesia. Inilah yang oleh Benedict Anderson (1983/2001) disebut sebagai *imagined community*, *imagined political community*, suatu komunitas politik bangsa yang dilihat sebagai wacana-wacana terbayangkan (*imaginary discourses*). Dalam perspektif ini, suatu komunitas bisa dibedakan dari komunitas lain, bukan karena keunikan atau keaslian asal-usulnya, tetapi oleh cara mereka mengimajinasikan diri dan komunitas mereka itu.

Sebagai semangat dan tekad bersama (Magnis-Suseno, 1998) dari berbagai *ethnonation*, makna simbol nasionalisme yang baru diciptakan itu bisa memudar, berubah, atau berbeda sama sekali dari maksud awalnya. Berbagai konflik yang bernuansa ke-SARA-an akhir-akhir ini bisa dimaknakan sebagai fenomena memudar, berubah, atau hilangnya nasionalisme Indonesia. Bahkan, di kalangan anak-anak muda mahasiswa, terdapat loyalitas majemuk (*multiloyalty*) yang berimplikasi pada lahirnya nasionalisme Indonesia baru (*new nationalism*), terutama yang terjadi pada mereka yang bergabung dalam perkumpulan mahasiswa berbasis etnis-primordial (Darsono, 2021:78-88). Dalam konteks ini, setidaknya telah terjadi kerapuhan semangat dan tekad untuk bersama dalam kesatuan Indonesia dan terjadi peningkatan primordialisme. Latensi disintegrasi sebagai bangsa Indonesia demikian besar, meskipun manifestasinya ke dalam bentuk-bentuk “gerakan sparatisme” sampai sejauh ini masih bisa diredam.

Tidak seperti pandangan para ahli ekonomi pragmatis yang memercayai bahwa kemajuan ekonomi akan mengakhiri masa yang mementingkan ideologi dan identitas

etnis, gerakan-gerakan etnis yang terjadi sejak 1970-an mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik antar suku bangsa (Koentjaraningrat, 1993:2) dan bahkan mengarah pada “gerakan-gerakan separatisme etnik” terutama pada kedua daerah ujung Indonesia, “yakni Aceh dan Irian Jaya” (Koentjaraningrat, 1993:19). Dengan berbagai latar belakang, kebangkitan etnonasionalisme menjadi fenomena marak yang berhadapan dengan nasionalisme negara yang dikembangkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kasus Aceh dan Papua (pengganti nama Irian Jaya), etnonasionalisme ini berkembang menuju tuntutan kemerdekaan yang mengakibatkan terjadinya konflik antara komunitas etnis dengan negara (Darsono, 2015a, Darsono, 2015b). Penelitian Hadi dkk. (2007) terhadap berbagai fenomena disintegrasi di Aceh, Papua, Maluku, dan Timor Leste, menunjukkan adanya variasi latar belakang, bentuk, dan tuntutan gerakan-gerakan “separatisme”.

Persoalannya adalah bagaimana membangun wawasan keindonesiaan atau nasionalisme Indonesia dalam keragaman kultural tersebut yang dirajut dalam ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tampaknya, pengembangan nasionalisme Indonesia tidak lagi bisa dilakukan secara dogmatik dan monokultur dengan mengabaikan berbagai fenomena mutakhir dan mengesampingkan keragaman kultural, terlebih menyeragamkan kognisi dan budaya melalui represi kekuasaan otoritarian.

## **B. Perdebatan Teoretik**

### **1. Nasionalisme Indonesia**

Nasionalisme, dalam *Britannica Encyclopaedia* (1956:14), didefinisikan sebagai suatu sikap mental di mana loyalitas

tertinggi (*supreme loyalty*) dari individu adalah untuk bangsa. *Nationalism is the strong devotion to one's own nation* (Hornby, 1974:561). Dalam *Ensiklopedia Indonesia* ditemukan batasan bahwa nasionalisme dipandang sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dan dengan demikian merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa. Lebih dari sebuah sikap mental atau sikap sosial dan politik, nasionalisme adalah suatu keyakinan sebagaimana yang ditulis Kenneth Minoque (dalam Kuper dan Kuper, 2000:694—695) “setiap bangsa mempunyai hak dan kewajiban untuk membentuk dirinya sebagai negara”.

Persoalannya, menurut Minoque (Kuper dan Kuper, 2000:694—695) terdapat banyak kesulitan untuk membuat spesifikasi “apakah bangsa itu”, meski di antara hal terpenting dari sebuah bangsa adalah adanya budaya bersama dan bahasa persatuan. Bila bangsa dipandang sebagai suatu komunitas kultural atau bangsa kultural, maka bahasa, religi, sejarah, dan mitos menjadi bagian penting. Dalam hal ini, bahasa berperan paling penting dalam memelihara semangat dan tekad kebangsaan, baik sebagai persyaratan fungsional maupun sebagai rujukan identifikasi sebagai bangsa (Delanty, 2001).

Bila dirunut pada beberapa literatur, konsep tentang bangsa ini memang masih menghadirkan perdebatan. Hal ini diakui oleh E.J. Hobsbawm (1992) dalam tulisannya *Nation and Nationalism Since 1780*. Setelah menelaah beberapa literatur yang mengkaji nasionalisme, mulai dari Ernest Renan (1881) “*What is a nation*” yang dianggap sebagai peletak pertama konsep bangsa, Carleton B. Hayes (1931) dalam tulisannya *The Historical Evolution of Modern Nationalism*, Hans Kohn (1944) *The Idea*

of Nationalism: A Study in its Origin and Background, sampai pada Miroslav Hroch (1985) *Social Precondition of National Revival in Europe*, Benedict Anderson (1983) *Imagined Communities*, J. Amstrong (1982) *Nations before Nationalism*, J. Breuilly (1982) *Nationalism and the State* (1982), Ernest Gellner (1983) *Nations and Nationalism*, A.D. Smith *Theories of Nationalism* (1983), dan yang lain. Sebagian besar dari literatur-literatur tersebut berkisar pada pertanyaan “apakah bangsa itu?” dan tidak ada kriteria memuaskan yang bisa didapatkan untuk memutuskan yang mana dari beberapa kolektivitas manusia tersebut yang disebut sebagai bangsa (Hobsbawm, 1992:3–4). Masalahnya adalah “tidak ada cara untuk menunjukkan kepada peneliti bagaimana membedakan bangsa dari kesatuan lain secara *a priori*” (Hobsbawm, 1992:5). Demikian juga yang ditulis Benedict Anderson (2001:4) bahwa meskipun fakta-fakta yang ada tampak jernih, penjelasan mengenai nasion, nasionalitas atau kebangsaan, nasionalisme atau paham kebangsaan, menjadi persengketaan jangka panjang karena terbukti sulit sekali dirumuskan, apalagi diuraikan. Anderson (2001:4) mengutip apa yang dikatakan Hugh Seton-Watson, seorang penulis risalah nasionalisme yang dianggap sebagai terbaik dan lengkap, “Maka saya didorong kepada kesimpulan bahwa tidak ada ‘rumusan ilmiah’ apa pun yang bisa dirancang bagi suatu bangsa; toh fenomena [kebangsaan] itu nyata-nyata pernah dan masih ada”.

Hobsbawm (1992:9–12) sampai pada kesimpulan dengan mengambil posisi sebagai berikut. (1) Hobsbawm menggunakan istilah nasionalisme dalam pengertian yang didefinisikan oleh Gellner, yaitu bahwa nasionalisme adalah “suatu prinsip yang beranggapan bahwa unit politik dan nasional hendak selaras”. (2) Bangsa tidak

dianggap sebagai kesatuan sosial yang primer dan tidak mengalami perubahan, sehingga untuk tujuan analisis, nasionalisme hadir sebelum bangsa; bangsa tidak menciptakan negara dan nasionalisme, tetapi justru sebaliknya. (3) Masalah kebangsaan terletak pada titik pertemuan dari politik, teknologi, dan transformasi sosial. (4) Untuk alasan itulah, Hobsbawm memandang bahwa bangsa-bangsa adalah fenomena ganda, yang secara esensial dibangun dari atas, tetapi juga tidak bisa dipahami bila tidak dianalisis dari bawah, yaitu dalam istilah-istilah mengenai asumsi-asumsi, harapan-harapan, kebutuhan, keinginan-keinginan, serta kepentingan rakyat jelata yang tidak perlu nasional dan lebih tidak nasionalis. (5) Perkembangan bangsa-bangsa dan nasionalisme di negara-negara yang telah lama mapan, seperti Inggris dan Perancis, tidak terlalu intensif dipelajari, meskipun hal tersebut menarik perhatian. (6) Hobsbawm menambahkan bahwa tidak ada sejarawan bangsa-bangsa dan nasionalisme serius yang dapat menjadi nasionalis politik yang terlibat, kecuali dalam pengertian yang sama dengan orang-orang yang percaya kebenaran literal dari Al-Kitab, sementara tidak mampu membuat kontribusi kepada teori evolusi. Artinya, nasionalisme membutuhkan begitu banyak keyakinan pada apa yang sebenarnya tidak demikian. Dengan mengutip Renan, Hobsbawm menegaskan bahwa “mempercayai sejarah yang keliru merupakan bagian dari menjadi bangsa”. Anderson (2001:5–60) menggunakan titik keberangkatan pada pandangan bahwa “nasionalitas (*nationality*), atau mungkin lebih baik (melihat kerangka signifikan jamak kata itu), ke-nasional-an (*nationness*), sama halnya dengan nasionalisme, adalah artefak-artefak budaya (sejajar dengan benda-benda temuan arkeologis) jenis khusus”. Untuk memahaminya diperlukan

pertimbangan yang hati-hati bagaimana artefak-artefak budaya khusus itu mengada, bagaimana makna-maknanya berubah seiring perjalanan waktu, dan mengapa, sekarang ini, mereka menggugah keabsahan emosional yang demikian dahsyat. Anderson mengemukakan argumen bahwa penciptaan artefak-artefak ini merupakan penyulingan spontan atas “persilangan” berbagai kekuatan historis, namun sekali tercipta, artefak-artefak itu menjadi ‘modular’, dapat ditanamkan dengan berbagai derajat kesadaran-diri ke berbagai bentangan sosial yang luas, untuk melebur dan dileburkan dengan serangkaian tata politis dan ideologis yang luas pula. Artefak-artefak budaya yang khas ini telah membangkitkan rasa keterikatan yang begitu mendalam.

Menurut Anderson (2001:6–7), konsep dan definisi yang diberikan para teoretisi tentang nasionalisme itu membingungkan dan bahkan menghadirkan kegusaran karena adanya tiga paradoks. Ketiga paradoks itu adalah paradoks antara (1) modernitas objektif bangsa-bangsa di mata para sejarawan dengan kepurbaan subjektifnya di mata para nasionalis, (2) universalitas formal kebangsaan sebagai suatu konsep sosiokultural –dalam jagad modern semua orang bisa, mesti, akan ‘punya’ suatu kebangsaan tertentu, sama seperti tiap manusia memiliki jenis kelamin tertentu— dengan kekhususan pengejawantahan konkretnya yang tak terelakkan, (3) daya ‘politis’ nasionalisme dengan kemelaratan filosofisnya, atau malah ketidakkoherennya.

Tampaknya, kesulitan yang dialami untuk memberikan konsep dan definisi yang memuaskan tentang nasionalisme itu disebabkan oleh kecenderungan orang untuk membayangkan nasionalisme dengan N-besar. Oleh karena itu, menurut

Anderson (2001), masalah nasionalisme (dengan n-kecil) akan menjadi lebih mudah bila diperlakukan seolah-olah ia berbagi ruangan dengan “kekerabatan” dan “agama”, bukan dengan “liberalisme” atau “fasisme”. Bangsa atau nasion, dalam definisi Anderson, adalah “komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan”. Semua komunitas, asalkan lebih besar dari dusun-dusun primordial di mana para anggotanya saling bertatap muka langsung setiap hari (bahkan komunitas yang demikian ini pun) adalah komunitas terbayang. Akhirnya, tegas Anderson, bangsa dibayangkan sebagai sebuah *komunitas*, sebab

...tak peduli akan ketidakadilan yang ada dan penghisapan yang mungkin tak terhapuskan dalam setiap bangsa, bangsa itu sendiri selalu dipahami sebagai kesetiakawanan yang masuk mendalam dan melebar-mendatar. Pada akhirnya, selama dua abad terakhir, rasa persaudaraan inilah yang memungkinkan begitu banyak orang, jutaan jumlahnya, bersedia janganan melenyapkan orang lain, merenggut nyawa sendiri pun rela demi pembayangan tentang yang terbatas itu.

Sejalan dengan pemikiran Anderson, tulisan ini menggunakan konsep nasionalisme sebagai artefak-artefak budaya jenis khusus. Semangat kebangsaan Indonesia merupakan artefak budaya yang diciptakan dan merupakan penyulingan spontan atas “persilangan” berbagai kekuatan historis, kemudian ditanamkan dengan berbagai derajat kesadaran-diri ke berbagai bentangan sosial yang luas, untuk melebur dan dileburkan dengan serangkaian tata politis dan ideologis yang luas pula. Artefak budaya ini telah membangkitkan rasa keterikatan yang begitu mendalam sehingga tercipta perasaan bersama, budaya bersama sebagai bangsa Indonesia.

Dengan demikian, bangsa Indonesia itu sendiri merupakan sebuah totalitas yang tidak membedakan suku, ras, etnis, dan religi sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis dan koheren dengan prinsip-prinsip kesederajadan dan kekeluargaan. Ini berarti bahwa semua kepentingan kelompok diinstitutionalisasi ke dalam berbagai organisasi sosial, politik, ekonomi, atau keagamaan dengan tujuan untuk mengeliminasi superioritas di antara kelompok dan etnis, terutama superioritas kolonial. Inilah yang bisa membangkitkan adanya "budaya bersama" sebagai bangsa.

Nasionalisme Indonesia, dengan demikian, berkaitan dengan bangsa Indonesia sebagai sebuah kolektivitas yang menuntut loyalitas, baik individu-individu maupun kelompok-kelompok suku (etnis) yang terdapat di dalamnya. Ini berarti bahwa *supreme loyalty* (loyalitas tertinggi) dari individu maupun kelompok etnis hanya untuk bangsa Indonesia. Kesetiaan ini muncul karena adanya kesadaran akan pentingnya identitas kolektif sebagai bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Identitas kolektif inilah yang mendorong adanya keinginan untuk hidup bersama atau "kemauan untuk bersatu" (*a living and active corporate will*) yang merupakan substansi terpenting dari nasionalisme. Tidak selamanya kemauan untuk bersatu itu tumbuh dalam masyarakat yang multiras, multibahasa, multikultur, dan multireligi seperti Indonesia. Dari sisi ini, bangsa bukanlah sebuah konsep yang statis dan terberi (*given*), melainkan dinamis dan berkembang sesuai dengan dinamika kekuatan-kekuatan yang melahirkannya dan bertarung dalam interaksi antar-individu maupun kelompok etnis yang terdapat dalam kebangsaan Indonesia.

## 2. Multikulturalisme

Sebagaimana ditulis Charles Lemert (2001: 297), istilah multikulturalisme

(*multiculturalism*) kadang membingungkan dan tidak jarang digunakan secara tidak tepat. Multikulturalisme bisa mengacu pada dua hal yang berbeda, yaitu multikulturalisme sebagai suatu realitas dan multikulturalisme sebagai teori tentang realitas. Multikulturalisme juga sering dikacaukan dengan istilah posmodernisme. Posmodernisme yang lahir pasca-modernisme mencoba mendobrak asumsi teori modernisasi yang menghendaki universalisasi kultural atau homogenisasi politik kebudayaan. Agger (2006) menulis bahwa "Multikulturalisme adalah varian teori perbedaan (West, 1988; Collins; Lemert 1993) yang mengambil ide dari gagasan posmodernisme bahwa perbedaan manusia secara analitis adalah lebih penting ketimbang kesamaan mereka (Spivak, 1988; Butler, 1990)". Multikulturalisme menurut Agger (2006) merupakan varian paling politis dari posmodernisme Amerika. Oleh karena itu, kehadiran posmodernisme juga menjadi semangat multikulturalisme yang menghendaki penerimaan berbagai perbedaan dan kebedaan (keliyanan) dalam penataan (*arrangement*) sosial. Perbedaannya, "*whereas 'postmodernisme', when properly used refer to factual possibility, 'multiculturalism' can only be will used in reference to fact so evidentially accepted as to be beyond necessity of reference*" (Lemert, 2001:297).

Sebagai realitas sosial, multikulturalisme merujuk pada suatu fenomena bahwa dalam dunia yang besar dan luas dengan dunia sosial yang masyarakatnya hidup dalam tatanan global, justru muncul dan berkembang serta menguatkan kondisi multikultural, yaitu terdapat eksistensi orang-orang yang berbeda, dengan afinitas kehidupan kultural yang tak terhitung jumlahnya dalam kehidupan nyata mereka, dan secara lebih ekstrem dan tegas, terdapat kesepakatan bahwa tiap orang bisa menjadi dirinya sendiri yang berbeda dengan yang lain (Lemert, 2001:298). Dengan kata lain,

tatanan dunia yang mengglobal, di antaranya merupakan akibat dari berkembangnya modernisasi yang menghendaki universalitas dalam budaya-politik, justru menciptakan dan menguatkan suatu kondisi berkembangnya identitas-identitas sosial-kultural lokal dan individual. Identitas-identitas yang bersifat primordial, seperti ras, etnis, dan religi serta identitas-identitas yang berlabel individual justru menguat dan berkembang dalam jumlah yang tidak terhitung pada saat tatanan sosial-kultural menjadi semakin mengglobal. Fenomena terpecah-pecahnya Eropa Timur menjadi negara-negara kecil yang diiringi dengan sentimen etnis dan religi merupakan bukti menguatnya identitas-identitas sosial-kultural lokal-individual pada saat berkembangnya tatanan bersama.

Multikulturalisme berangkat dari Derrida (1988) yang mengikuti pemikiran Saussure (1983), yaitu bahwa kata dan konsep memiliki makna hanya dalam kaitannya dengan kata dan konsep lain yang membedakan mereka (Agger, 2006:140). Dari titik ini, multikulturalisme mengembangkan kritik masyarakat dan konsep masyarakat alternatif dengan merayakan (*celebration*) perbedaan sebagai kerangka kerja untuk menghargai banyak kelompok dan narasi khas mereka tentang pengalaman mereka. Dengan demikian, menurut Agger (2006) multikulturalisme justru memperbaiki politik identitas dengan mendorong setiap kelompok tertindas untuk mengisahkan pengalaman ketertindasan mereka yang berbeda dengan pengalaman ketertindasan yang lain.

Multikulturalisme, dengan demikian, di samping digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara (Lemert, 2001), ia justru menjadikan pribadi sebagai agenda politik utama sehingga lebih dekat dengan liberalisme. Ini berimplikasi pada

perlakuan multikulturalisme pada fenomena sosial seperti kelas, ras, jender, pendidikan, dan agama, sebagai variabel yang berada pada tingkat individu (Agger, 2006:143). Dengan demikian, multikulturalisme (yang memang dipengaruhi oleh posmodernisme) mirip dengan Weber atas asumsi individualistiknya tentang makna kelas, ras, dan gender. Perbedaannya, bila Weber mengukur efek sosiologis karakteristik individual, multikulturalisme menggunakan pengalaman individu sebagai pembuat narasi yang khas atas pribadi mereka.

Sebagai teori sosial, ada beberapa pandangan yang berbeda dari para teoritis multikulturalisme. Glazer (1997), misalnya, lebih sering menggunakan kata multikulturalisme sebagai "*a political weapon*" atau senjata politik, sedangkan Arthur Schlesinger (1991) memberlakukan multikulturalisme dalam kontestasi kelompok-kelompok etnik (*ethnic group*), sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat pada 1980-an. Perlawanan etnik yang terjadi di Amerika Serikat secara relatif merupakan penolakan terhadap gagasan *common culture* (kebudayaan umum) dan *single society* (masyarakat tunggal) (Lemert, 2001:301). Menurut Schlesinger, perlakuan identitas nasional pada masyarakat justru melahirkan loyalitas kelompok pada identitas etnik di antara orang-orang Afrika, Asia, Karibia, dan Amerika Latin, serta pada masyarakat-masyarakat yang lain.

Meskipun demikian, dalam praktek politik yang aktual, perhatian atas perlakuan identitas nasional juga bisa dikaitkan dengan fenomena yang lain, yaitu kelompok-kelompok sosial yang bukan etnis dan rasial, seperti yang dikenal dengan *queer identity* (khususnya gay dan lesbian) dan feminisme, atau yang sering disebut dengan gerakan-gerakan identitas. Tulisan Jean Bethle Elshtain (1995) yang berjudul

*Democracy in Trial* menunjukkan hal ini (Lemert, 2001:301). Dengan demikian, multikulturalisme bisa mengacu pada perlawanan terhadap budaya tunggal (monokultur) sebagaimana Schlesinger, tetapi juga bisa sebagai aplikasi kelompok-kelompok atau individu-individu dalam masyarakat yang tidak sederhana. Ini berarti bahwa tiap individu dapat membentuk dan mengembangkan identitas mereka dengan mempertimbangkan sejumlah kelompok etnik dan sosial yang ada.

Pada akhirnya, tegas Lemert (2001:301), multikulturalisme adalah teori sosial yang tidak hanya bertumpu pada (satu) teori, misalnya teori sosiologi, tetapi merupakan teori sosial yang selalu membangun argumentasi antara dan di antara (*between and among*) berbagai variasi proponent sebagaimana yang tampak pada teoritis yang disebut "progresif" seperti Unger dan West (1998:25) atau yang "radikal" seperti Giddens.

Multikulturalisme dalam tulisan ini digunakan sebagai suatu paradigma dan sekaligus praksis yang percaya bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *coexistence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain dalam kerangka menemukan kembali (*reinventing*) gagasan-gagasan yang lebih masuk akal tentang bagaimana sebuah masyarakat majemuk di Indonesia ini dapat dikembangkan dalam sebuah konsepsi masyarakat "warna-warni" yang tidak saja berciri partisipatoris namun juga emansipatoris. Dengan demikian, multikulturalisme tidak hanya berciri *coexistence* namun lebih pada *proexistence* (Sparringa, 2007). Melalui politik multikulturalisme ini, baik individu maupun kelompok-kelompok etnis, mampu menciptakan kembali diri dan belajar

bagaimana memahami pengalaman ketertindasan dirinya dengan membaca dan mendengarkan narasi anggota kelompok yang lain (Agger, 2006:141).

### 3. Nasionalisme Konstruktivis Multikulturalis

Sebagai entitas sosial dan sekaligus identitas sosial sebagai bangsa (*nation*), nasionalisme itu bisa dipandang sebagai sesuatu yang memang secara nyata telah ada (*real*) dan berkembang sepanjang sejarah bangsa yang bersangkutan, namun bisa juga dipandang sebagai sesuatu yang dikonstruksikan (*constructed*). Hal ini melahirkan perdebatan antara dua kelompok utama teori nasionalisme (Kellas, 1998; Beatty, 1999; Cederman, 1999; Delanty, 2001) dengan berbagai variannya, yaitu kelompok teori yang berperspektif esensialis/primordialis (*essentialist/primordialist perspectives*) dan kelompok teori yang berperspektif konstruktivis (*constructivist perspectives*).

Perspektif esensialis/primordialis yang dikembangkan oleh Anthony Smith (1971; 1986; 1991; 1995) memandang nasionalisme sebagai *authentic culture traditional* (tradisi budaya yang otentik) (Delanty, 2001) atau didasarkan pada *ancient cultural raw material* (Cederman, 1999) dan berkembang melalui proses yang disebut *self-contained cultural process* (Kellas, 1998) sehingga eksistensi etnik dengan sejarah kebudayaannya menjamin eksistensi nasionalisme. Menurut perspektif ini, (a) suatu bangsa (*nation*) didasarkan pada esensi primordial, (b) tradisi budaya yang otentik itu bisa dijelaskan oleh sejarah, dan (c) kekuatan tradisi bangsa adalah sebuah wacana yang berkembang sepanjang sejarah tradisi bangsa itu (Delanty, 2001). Nasionalisme bersifat kontinu dan terus berlangsung sepanjang sejarah. Akar nasionalisme adalah elemen-elemen yang membentuk



bangsa, yaitu elemen *tangible* yang berupa identitas, seperti bahasa, agama, teritorial dan elemen *intangible* yang bersifat psikologis, berupa ikatan emosional yang terbentuk dari pengalaman, keyakinan, dan nilai bersama (Kellas, 1998).

Perspektif konstruktif, dengan cara pandang yang berbeda, menjadi bagian penting dalam teori nasionalisme sebagai cara pandang baru yang melihat bangsa sebagai konstruksi sosial (Sykora, 2009; Delanty, 2001). Perspektif ini dikembangkan oleh Benedict Anderson dengan *imagined community* (1983/2001), Eric Hobsbawm (Hobsbawm dan Ranger, 1983; Hobsbawm, 1990, sebagaimana dalam Delanty, 2001:437) dengan konsep *invention tradition*, Ernest Gellner dengan konsep *fabrication as true community* dalam *post-traditional form of cohesion* (Gellner, 1983; 1987; 1994), Billig (1995) melalui *banal nationalism* yang oleh Delanty (2001) disebut *post-historical nationalism*, George Mosse (1975; 1985; 1993) dengan konsep *cultural logic of nationalism* (dalam Delanty, 2001:477), dan John Breuilly *conducting politics by mass mobilization* (1982 dalam Delanty, 2001:477).

Berbeda dengan pandangan esensialis/primordialis, perspektif konstruktif melihat bahwa nasionalisme tidak terbentuk begitu saja karena elemen-elemen primordial yang bersifat konsepsi biologik maupun adanya ketidakadilan secara kontekstual, tetapi melalui rekayasa sosial, kreasi strategis elit dengan memanfaatkan warisan primordial dan setting sosial, politik, budaya kontekstual yang sedang mereka hadapi. Dalam pandangan ini, ada dua komponen penting yang terlibat, yaitu pemimpin/kepemimpinan dan organisasi yang menggunakan nasionalisme untuk memobilisasi massa. Karena nasionalisme itu dikonstruksi oleh aktor sosial, maka nasionalisme itu tidak bisa dijelaskan hanya melalui referensi

sejarah. Suatu bangsa adalah sebuah diskursus/wacana naratif yang selalu terbuka untuk diformulasikan sesuai dengan tujuannya.

Bila Anthony Smith yang esensialis/primordialis lebih menekankan pada pandangan apriori bahwa eksistensi etnis dan aspek historis menjadi inti nasionalisme, Hobsbawm yang konstruktif, secara kontras, melihat nasionalisme sebagai "*primarily a modern construction, a creation of strategic elites*" (Delanty, 2001:473) yang menggunakan nasionalisme untuk memobilisasi massa. Nasionalisme yang utama adalah konstruksi modern, yang berbeda dengan kultur tradisional dan historis, yang konstruksi modern tersebut dikreasi oleh para elit. Dengan demikian, nasionalisme berkaitan dengan "*invented tradition*" (Hobsbawm dan Ranger, 1983 dalam Delanty, 2001: 473).

Benedict Anderson (1983/2001) termasuk konstruktif meskipun mengkritik Hobsbawm karena *invention tradition* dan menggantinya dengan *imagined political community*. Ia merumuskan tesis bahwa suatu bangsa bisa dilihat sebagai wacana-wacana terbayangkan (*imaginary discourses*). Suatu komunitas bisa dibedakan dari komunitas lain, bukan karena keunikan atau keaslian (asal-usul)-nya, tetapi oleh cara mereka mengimajikan (membayangkan) diri dan komunitas mereka. Nasionalisme dipandang sebagai salah satu kognisi dan makna budaya sehingga konsep *nation building* (dalam hal ini: ke-Indonsia-an) adalah sebuah pembayangan yang ideal. Kebutuhan dan semangat untuk bersatu itu mengalahkan asal-usul keetnisan mereka, melupakan perbedaan dan keragaman, dan membayangkan kebesaran nasionalisme Indonesia.

Ernest Gellner (1983; 1987; 1994 dalam Delanty, 2001; Sykora, 2009; O'Leary, 1997) melihat nasionalisme dalam masyarakat

modern melalui konsep *post-traditional form of cohesion*. Menurut Gellner (Sykora, 2009), nasionalisme lebih mengacu pada kemampuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk kultural, membentuk kembali, dan menjadikannya identitas baru, komunitas baru, tanpa melupakan kelanjutannya dari masa lalu. Analisis tentang nasionalisme harus memperhatikan keseimbangan dalam masyarakat modern bahwa nasionalisme merupakan prinsip politik dengan menempatkan secara sejajar eksistensi identitas, tradisi, dan kultur. Dengan mengacu pada Karl Deutsch (1953), Gellner menulis bahwa komunikasi yang intensif dalam masyarakat modern akan menghasilkan nasionalisme (Delanty, 2001: 476). Nasionalisme merupakan hasil *fabricated ideology*.

Michael Billig (1995) melalui terminologi *banal nationalism* menjelaskan bahwa nasionalisme bisa ditemukan dan melekat dalam kehidupan keseharian karena nasionalisme itu mengacu kepada sesuatu yang bersifat natural dalam bagian-bagian kehidupan sehari-hari, misalnya yang tampak pada media. Turisme dan olah raga merupakan dua contoh nyata bidang kehidupan sehari-hari yang mengartikulasikan sebuah bangsa. Oleh Delanty (2001), perspektif yang demikian disebut sebagai *post-historical nationalism*, dengan pengertian bahwa terjadi pergeseran diskursus tentang bangsa, dari sejarah (*history*) menuju *post-industrial popular culture*. Hal ini sejalan dengan George Mosse (1975; 1985; 1993, sebagaimana dalam Delanty, 2001:477) yang mengemukakan konsep *cultural logic of nationalism*. Menurut Mosse, faktor-faktor, seperti etika respektabilitas kelas menengah-bawah, estetisasi politik, dan gabungan (*fusion*) antara alam (*nature*) dan bangsa (*nation*) merupakan diskursus nasionalisme yang kemudian melahirkan gerakan nasionalis. Hal ini juga ditegaskan

oleh John Breuilly (1982) yang melihat nasionalisme sebagai alat konduksi politik untuk memobilisasi massa.

Sampai sejauh ini, dalam pandangan teoretisi nasionalisme konstruktivis, nasionalisme bukanlah aspek-aspek atau komponen-komponen yang statis (*static*) dan terberi (*given*), melainkan dipandang sebagai sebuah konstruksi yang dinamis (*dynamic*) dan mobilitis. Hobsbawm (1983) dengan *strategic elites for mobilization of the masses*, Anderson (1983) melalui *imagined*, John Breuilly (1982) dengan *conducting politics by mass mobilization*, George Mosse (1993) dengan *progressive movement*, termasuk Hecter (1975) yang menggunakan nasionalisme dalam terminologi "*strategic goal of nationalist leader*" dalam pengertian bahwa gerakan nasionalis lebih dilihat sebagai kemampuan untuk memaksimalkan keuntungan dari dukungan massa, dan Elie Kedourie (1993) yang melihat nasionalisme sebagai gerakan yang disebabkan oleh ideologi nasionalisme, adalah teoretisi yang melihat nasionalisme sebagai konstruksi yang mobilitis.

Berbagai literatur yang berkaitan dengan gerakan-gerakan sosial yang baru, termasuk gerakan nasionalisme, sebagaimana ditulis Delanty (2001), menunjukkan adanya pergeseran (*shift*) fokus dari identitas ke mobilisasi. Demikian juga nasionalisme konstruktivis yang mobilitis sebagaimana yang ditulis oleh O'Mahony dan Delanty (1998) melalui konsep formasi identitas. Lebih dari sekadar mobilisasi massa, nasionalisme merupakan proyek yang dikonstruksi dalam lapangan relasional yang dikreasi ketika mobilisasi kelompok mendukung pandangan mereka.

Dengan mengikuti tradisi Hobsbawmian dan Gellnerian (Sykora, 2009) yang berfokus pada peran transisi sosial sebagaimana tampak dalam industrialisasi, lahirnya kapitalisme, dan sentralisasi dan globalisasi,

maka menjadi penting untuk menekankan atau setidaknya melengkapi konsepsi nasionalisme konstruktivis yang mobilitas tersebut dengan elemen-elemen kultural yang disebut dengan nasionalisme kultural (*cultural nationalism*). Pendekatan ini lebih mengacu pada Joep Leerssen (2006) yang menggunakan istilah nasionalisme kultural (*cultural nationalism*) dan kultivasi kultur (*cultivation of culture*) dengan melihat bahwa nasionalisme lebih mengacu pada kemampuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk kultural dengan membentuk kembali dan menjadikannya identitas baru atau komunitas baru, tanpa melupakan atau sebagai kelanjutan dari masa lalu. Aktivitas kultural merupakan anteseden yang dipertimbangkan dalam menjelaskan kategori-kategori nasionalisme. Dalam membangun teori *cultivation of culture*, Leerssen (2006) mengambil teori Miroslav Hroch (1985 dan 1993) tentang tiga fase nasionalisme yang disebutnya sebagai fase A B C. Fase A disebut sebagai "*raising cultural consciousness*" (munculnya kesadaran kultural), yang akan menjadi prasyarat munculnya fase B yang disebutnya "*social demand*" atau kebutuhan sosial, sedangkan fase C yang dinamakan "*political activism*" (aktivisme politik), yaitu pembentukan bangsa yang bisa dipikirkan (*the nation thinkable*) sebagai fokus loyalitas politik (Sykora, 2009:6).

Dalam kaitan dengan komunitas nasional inilah kemudian muncul persoalan bagaimana hubungan di antara diversitas kultural yang ada, terutama antara *unity* dan *diversity*. Mengikuti pemikiran Gerald Kernerman (2005) ketika membahas nasionalisme multikultural di Kanada, yaitu bahwa di satu sisi dibutuhkan kesamaan perlakuan kewargaan atas berbagai kultur, etnis, ras, bahasa, religi, gender, dan lain-lain, sedang di sisi lain

dibutuhkan pembedaan karena adanya berbagai kekhasan, baik aturan-aturan, prosedur, simbol, dan sistem politik yang spesifik. Dengan kata lain, terjadi oposisional antara kesamaan dan perbedaan kewargaan, antara kesamaan pembagian dan asimetri federalisme, antara kesetaraan kewargaan dan kewargaan plus, antara hak-hak individual dan hak-hak kolektif, antara representasi imparial dan basis-kelompok, dan yang lain. Daripada menempatkan kedua kelompok tersebut secara oposisional yang berkontestasi apalagi berlawanan, Kernerman menempatkannya dalam posisi yang saling berhubungan secara dialektik. Dengan demikian, nasionalisme multikultural merupakan sebuah situs polarisasi yang didorong oleh pemahaman eksklusif mutual atas unit-unit identitas, di mana kelompok-kelompok, bangsa-bangsa, atau orang-orang merasa eksis dalam pemahaman kolektif komunitas politik. Nasionalisme mencakup konsepsi bagian dan keseluruhan dalam membangun identitas. Diversitas dipahami sebagai bagian dari identitas yang berbeda dan perbedaan itu bermakna dalam variasi kategori identitas yang disebut "*the logic of identity*". Identitas itu sendiri dibangun secara *grounded* dalam "*refusal of alterity, a denial of complexity, in favour of reified, and simplified identity categories*" (Kernerman, 2005:6). Dalam konteks ini, multikulturalisme yang disampaikan oleh Parekh (2000) menjadi relevan.

### C. Pembangunan Nasionalisme Indonesia

Pembangunan nasionalisme Indonesia sampai sejauh ini masih dibayangi oleh berbagai persoalan, dua di antaranya adalah (1) persoalan keetnisan dan kebangsaan dan (2) pola pengembangan yang mengarah pada penyeragaman melalui represi otoritarian sebagaimana yang terjadi pada masa orde baru.

## 1. Persoalan Keetnisan dan Kebangsaan di Indonesia

Sebagai *multination-state*, pola hubungan di antara komunitas etnis itu bervariasi, terentang dari hubungan yang berpola stratifikatif atau vertikal, yaitu salah satu kelompok mendominasi kelompok-kelompok lain secara politik dan ekonomi, sampai yang berpola segmentatif atau horisontal, yaitu tiap kelompok menguasai sumber/institusi sendiri. Dalam konteks yang demikian, di antara kelompok-kelompok etnis itu sering harus berinteraksi, juga berhadapan-hadapan. Proses interaksi, termasuk persaingan antaretnis ini bisa berjalan dengan cara kemasyarakatan yang damai, namun tidak jarang melalui jalan kekerasan. Tujuannya tidak lain adalah dalam rangka menguasai (dalam arti mengendalikan aparat-aparat negara), meraih otonomi (pemerintahan daerah), dan tidak jarang pula terjadi tuntutan kemerdekaan, terlepas dan terpisah dari negara, apabila tuntutan-tuntutan etnis tidak bisa dipenuhi. Oleh karena itu, lebih dari 50% dari negara-negara yang *multination-state* tersebut (Osawa, 1997) memiliki satu atau lebih kelompok etnis yang bermasalah, yaitu kelompok-kelompok etnis yang secara ekstrem memiliki aspirasi nasionalisme yang menuntut kemerdekaan.

Hubungan antaretnis di Indonesia diwarnai dengan persaingan, pertentangan, dan bahkan ketegangan. Kerusuhan Mei 1998 menunjukkan adanya sentimen terhadap etnis tertentu. Peristiwa Sampit dan Sambas pada 2000 juga menunjukkan adanya ketegangan hubungan antaretnis dan bahkan ketegangan ini mewujud menjadi pertarungan terbuka antaretnis. Demikian juga yang terjadi di Ambon, Maluku, ketegangan etnis yang bernuansa agama juga menyeruak dan menjelma menjadi pertarungan terbuka antaretnis.

Dalam hal yang demikian, bisa dicermati munculnya gerakan-gerakan nativisme pasca-reformasi.

Berbagai konflik yang bernuansa keetnisan tersebut bisa dimaknakan sebagai fenomena memudar, berubah, atau hilangnya kebangsaan Indonesia. Setidaknya, terjadi kerapuhan semangat dan tekad untuk bersama dalam kesatuan kebangsaan Indonesia dan terjadi peningkatan primordialisme. Latensi disintegrasi sebagai bangsa Indonesia demikian besar, meskipun manifestasinya ke dalam bentuk-bentuk yang sering diistilahkan sebagai "gerakan sparatisme" masih bisa diredam.

Timor Timur yang melepaskan diri dari Indonesia dan sekarang menjadi Republik Demokratik Timor Leste, meskipun Timor-Timur memang memiliki sejarah yang relatif berbeda dengan etnis-etnis yang lain, menjadi salah satu contoh kuat dalam hal ini. Demikian juga dengan tetap eksisnya gerakan-gerakan nasionalisme etnis (*ethno-nationalism*) yang menuntut kemerdekaan (dalam perspektif yang berbeda, gerakan yang seperti ini disebut sebagai gerakan separatisme) di berbagai wilayah, di antaranya di Papua dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan di Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Penelitian Hadi dkk. (2007) terhadap berbagai fenomena disintegrasi di Aceh, Papua, Maluku, dan Timor Leste menunjukkan adanya variasi latar belakang, bentuk, dan tuntutan gerakan-gerakan "sparatisme". Di satu sisi, negara mengambil peran besar sebagai penyebab/latar belakang munculnya tuntutan kemerdekaan, misalnya karena otoritarianisme rezim yang sentralistik, sedangkan di sisi lain, konflik yang terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat lokal juga ikut memiliki andil yang cukup besar akan tuntutan kemerdekaan. Yang juga tidak bisa dikesampingkan adalah

dinamika internasional yang ikut mengambil bagian dalam munculnya tuntutan kemerdekaan etnis.

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa nasionalisme etnis (*ethno-nations*) itu bangkit dan harus berhadapan dengan nasionalisme negara (*nation-state*) Indonesia? Meski jawaban atas pertanyaan tersebut kompleks, secara esensial tampaknya ada kekeliruan paradigma dalam melihat keetnisan di Indonesia. Keragaman etnis lebih dipandang sebagai masalah dan bencana daripada sebagai anugerah dan kekayaan. Karena dilihat sebagai masalah, keetnisan ditekan secara represif sedemikian rupa sehingga tidak muncul ke permukaan. Dengan alasan SARA, komunitas-komunitas etnis tidak diberi hak dan kebebasan untuk mengembangkan kekhasan (sosial-budaya) mereka. Yang justru dikembangkan oleh negara ialah keseragaman budaya; maka sedikit saja ada aktivitas sosial atau politik yang bernuansa etnis, negara langsung memberikan stigma sebagai gerakan separatisme, atau ancaman kesatuan dan persatuan. Dengan kata lain, sistem politik etnis yang dikembangkan negara tidak cukup mewadahi kepentingan-kepentingan etnis. Sistem politik sentralistik yang dipadu dengan otoritarianisme, atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak sesuai dengan politik identitas etnis. Kelompok-kelompok etnis merasa tidak sejalan dengan Pemerintah Pusat, lalu mengembangkan solidaritas etnis.

## **2. Pembangunan Nasionalisme Indonesia Era Orde Baru**

Penelitian Koentjaraningrat pada 1990 tentang kesukubangsaan di empat negara, yang hasilnya ditulis dalam naskah buku *Ethnic Diversity and National Unity: A Comparison Study of Indonesia, India, Yugoslavia, and Belgium*, berfokus pada hubungan antarsuku bangsa. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa memang tidak semua negara multietnik harus diikat oleh kebudayaan nasional dan ideologi nasional yang kuat dalam rangka mencapai kemajuan dan kemakmuran dalam negara yang bersatu, misalnya Singapura dan Belgia, akan tetapi untuk memperkuat kesatuan bangsa tanpa menghilangkan kebudayaan-kebudayaan suku bangsa, negara yang multietnis memerlukan strategi penguatan budaya dan ideologi (Koentjaraningrat, 1993:3-4). Khusus untuk Indonesia, Koentjaraningrat menulis:

Selama lebih dari 25 tahun, sejak pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, hubungan antarsukubangsa tampaknya makin baik, terutama di Jakarta, suatu generasi baru muncul, yang tidak membawa identitas suku bangsa dari para nenek moyang mereka secara kuat (Koentjaraningrat, 1993:27).

Oleh karena itu, disimpulkan bahwa masalah kebhinnekaan sukubangsa dan kesatuan nasional di Indonesia telah menunjukkan kepada kita bahwa suatu negara berkembang besar yang multietnik memerlukan suatu kebudayaan nasional untuk mengintensifkan perasaan identitas nasional dan solidaritas nasional di antara warganya (Koentjaraningrat, 1993:29).

Sejalan dengan hal tersebut, dalam tulisannya pada 1990-an yang berjudul "*Cultural Diversity and National Policy in Indonesia*", Sedyawati (2008:46) menulis bahwa sebagai bangsa Indonesia yang multietnis dan multireligi maka motto *unity in diversity* adalah kunci penting menuju kebudayaan nasional Indonesia. Motto Bhinneka Tunggal Ika itu mengimplikasikan kebijakan kebudayaan yang mengakui diversitas, tetapi tetap dalam kerangka membangun satu unitas kebudayaan nasional yang kuat.

Dengan membangun satu kebudayaan dan ideologi nasional yang kuat tanpa menghilangkan kebudayaan-kebudayaan etnis yang beragam, maka Koentjaraningrat (1993) dan Sedyawati (2008) menganjurkan pluralisme kebudayaan. Kebudayaan-kebudayaan etnis terus dikembangkan sejalan dengan kebudayaan nasional. Untuk ini, Sedyawati (2008) mengajukan dua langkah utama, yaitu (1) usaha-usaha penggalan, pelestarian, dan pengembangan budaya-budaya suku-suku bangsa yang dimaksudkan demi kontinuitas identitas suku bangsa sekaligus untuk diperkenalkan kepada suku bangsa yang lain dan (2) memanfaatkan segala kiat dan hasil perkembangan mutakhir dalam pengemasan informasi.

Pemikiran-pemikiran Koentjaraningrat dan Sedyawati tersebut menjadi inti kebijakan negara, terutama masa Orde Baru, dalam mengembangkan kebudayaan, baik kebudayaan lokal, nasional, maupun dalam hubungan dengan kebudayaan dunia internasional. Pluralisme budaya dalam unitas kebudayaan nasional menjadi sentral pengembangan kebudayaan nasional. Bahkan untuk kepentingan ini, Negara, yaitu pemerintah rezim orde baru, menggunakan perangkat militer. Sejak memerintah, Soeharto sebagai pemimpin baru yang kemudian menamakan masa pemerintahannya sebagai Orde Baru yang berbeda dengan Orde Lama masa Soekarno, memang mengembangkan visi Indonesia yang integralistik (Elson, 2008:369) dan visi ini berkembang hebat sejak 1970-an "selagi negara menunjukkan otonominya, memperoleh kepercayaan diri dan tujuan yang makin jelas, serta makin represif tanpa ragu".

Untuk menegakkan ideologi nasional menuju Indonesia yang integralistik itu, menurut Soeharto yang memimpin Orde

Baru, politik harus dikendalikan. "Soeharto menganggap persaingan ideologi sebagai model politik yang sama sekali tidak pas untuk Indonesia" sehingga berbagai visi tentang Indonesia yang saling bertentangan "dan telah membuat trauma mendalam sepanjang sejarah bangsa sejak 1945 akan dihilangkan dan ditindas" (Elson, 2008:370—371).

Untuk itu, Soeharto membuat gagasan "kesepakatan nasional" yang mencakup "perubahan total atas struktur politik lama" di mana persaingan bakal berupa kontes terkendali memperebutkan sarana, bukan ideologi dan cita-cita akhir, serta teknokratis. ... belakangan Soeharto mengenang "untuk meletakkan dasar bagi bidang ideologi dan politik sebagai persiapan tinggal landas .... Tujuan kami adalah memanunggalkan segala lapisan, kelompok, kekuatan, dan generasi di negeri kita dengan dasar, ideologi, serta cita-cita negara dan bangsa".

Konsep negara integralistik yang dikembangkan Orde Baru menempatkan budaya daerah sebagai budaya "bawahan", sebagai unsur pembangun kebudayaan nasional yang lebih diagungkan. Konsep ini kemudian ditampakkan dalam "budaya peniruan" ketika Taman Mini Indonesia Indah dibangun atas gagasan Ibu Tien Suharto. Gagasan yang dikembangkan melalui pembangunan Taman Mini Indonesia Indah ini adalah "penggambaran keragaman budaya dan standar kepulauan Indonesia yang abadi dan sengaja dipisahkan ditampilkan sebagai unsur bawahan, tetapi terintegrasi dalam identitas dan budaya nasional yang lebih besar dan memegang kendali" (Elson, 2008:378). Lebih lanjut, Elson mengatakan bahwa gagasan yang umum adalah bahwa etnisitas lokal yang hendak bertahan harus selalu dikendalikan secara pasif oleh identitas

nasional yang lebih besar— yang diterima tanpa syarat dan isinya tidak dijelaskan— dan hanya diungkapkan berdasarkan kecenderungan penyeragaman dalam identitas nasional” (Anderson, 1990:182 dalam Elson, 2008:379).

Perlawanan yang muncul atas sistem politik integralistik yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan, kecenderungan penyeragaman identitas etnis, dan ketimpangan sosial-ekonomi antara pusat dan daerah umumnya lemah, terpecah-pecah, dan terbungkam. Hal ini disebabkan oleh ampuhnya mobilisasi mekanisme represi dan sebagian karena imbalan materi yang ditawarkan atas keikutsertaan dalam konteks ketika tidak banyak ruang gerak selain ke arah “bentuk-bentuk aksi politik terbatas” yang bisa ditoleransi (Aspinal, 2005 dalam Elson, 2008:382). Tentu saja, dalam melakukan represi terhadap setiap gerakan yang bernuansa etnis, ras, dan agama yang kemudian dikeramatkan menjadi isu SARA, militer menjadi instrumen penting. Dengan strategi politik yang demikian, bentuk-bentuk perlawanan terhadap konsep negara integralistik bisa dipatahkan dan Orde Baru mampu bertahan hingga lebih tiga dasa warsa, meski akhirnya rezim tersebut tumbang pada 1998 oleh kekuatan massa.

Setelah berlangsung satu abad, tentu saja dalam situasi sosial-politik pascareformasi 1998, nasionalisme Indonesia kembali diperbincangkan (bisa dibaca dipertanyakan). Pada 2008, Pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudoyono mencanangkan 100 tahun kebangkitan nasional. Intinya, nasionalisme bangsa Indonesia mesti dibangun kembali sehingga perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia lebih besar dibandingkan dengan kecintaan atas budaya daerah/lokal (etnosentrisme) dan

kebudayaan global. Dengan kata lain, dengan adanya fenomena ketegangan hubungan antaretnis dan tuntutan kemerdekaan etnis, fenomena memudarnya nasionalisme Indonesia dan meningkatnya etnosentrisme memang semakin tampak jelas.

Sebagaimana ditulis oleh Hadi (2007), Negara, terutama melalui perangkat militer, di samping faktor internasional, menjadi penyebab maraknya tuntutan disintegrasi pasca-orde baru. Tentu saja, dinamika masyarakat lokal juga ikut mengambil bagian penting dalam hal ini. Peningkatan intensitas konflik lokal di banyak daerah di Indonesia pasca-orde baru yang dipicu oleh euforia kebebasan pasca-era otoritarianisme menuju era demokrasi serta menurunnya kekuatan dan kemampuan negara dalam menciptakan tatanan yang stabil mendorong tumbuhnya aspirasi kebebasan politik lokal. Di samping kuatnya kompetisi untuk memperebutkan akses terhadap otoritas kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi, faktor identitas juga muncul menjadi pendorong konflik dan disintegrasi. Konflik lokal Aceh dan Papua, menurut penelitian Hadi (2007:274) juga memiliki akar permasalahan yang demikian, yaitu kekecewaan historis, kesenjangan ekonomi, dan peminggiran identitas kultural.

#### **D. Kasus Papua**

Disertasi Darsono (2015b) dan tulisan ilmiahnya yang dipublikasikan dalam jurnal *American International Journal of Social Sciences* (Darsono, 2015a) mengkaji secara komprehensif kasus Papua sebagai salah satu persoalan dalam mengembangkan nasionalisme Indonesia ketika berhadapan dengan tuntutan kemerdekaan etnis (*ethnonationalism*) yang lebih dikenal dengan Papua Merdeka. Melalui analisisnya tentang konstruksi nasionalisme mahasiswa Papua yang sedang studi di Surabaya

dalam perspektif multikulturalisme, dikemukakan tiga hal berikut: (1) konstruksi terhadap elemen esensial-primordial sebagai identitas nasional Papua, (2) faktor pendorong berkembangnya konstruksi tersebut, dan (3) makna nasionalisme itu dalam kehidupan masyarakat Papua.

### **1. Konstruksi terhadap Elemen Esensial-Primordial sebagai Identitas Papua**

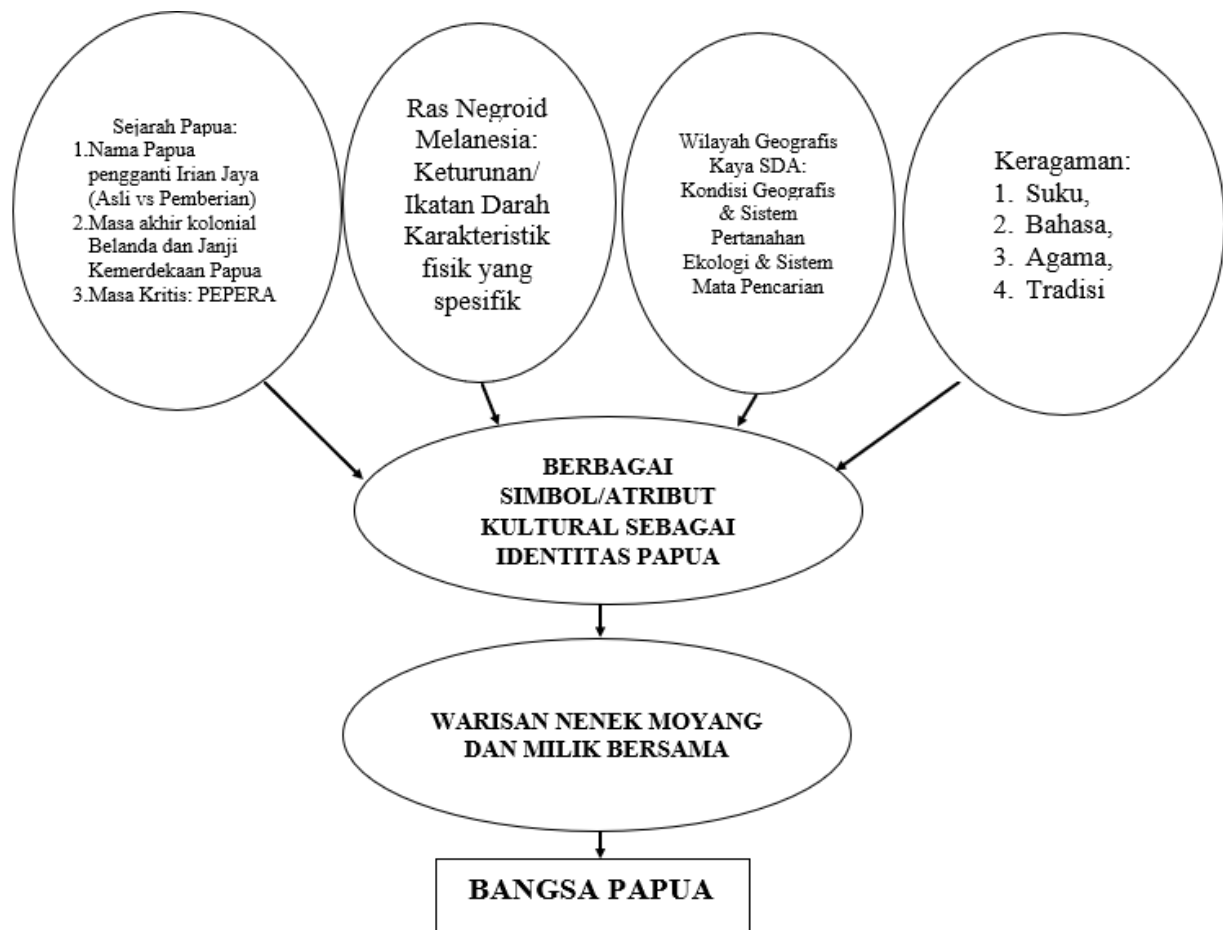
Bagi sekelompok orang yang memiliki berbagai kesamaan, dari kesamaan yang langsung tampak seperti ras dan wilayah geografis dengan berbagai sumber daya atau potensi alamnya, sampai pada pola hidup yang membentuk kultur bersama, seperti sejarah, agama atau religi, bahasa, dan berbagai tradisi yang menampak pada berbagai simbol dan atribut kultural, dan diikat oleh darah-keturunan yang kemudian disebut bangsa, elemen-elemen esensial-primordial tersebut menjadi identitas bersama sebagai sebuah komunitas bangsa. Identitas bersama komunitas bangsa ini dipahami sebagai “warisan” nenek moyang yang perlu dijaga dan dilestarikan demi kelangsungan kehidupan bersama sebagai bangsa tersebut. Lebih dari itu, sebagai “warisan” dari nenek moyang, elemen-elemen esensial primordial tersebut dianggap sebagai “milik” mereka bersama, baik secara individual maupun secara kolektif. Oleh karena itu, ketika “warisan” nenek moyang yang telah mereka “miliki” tersebut diintervensi oleh orang lain yang dianggap berasal dari luar komunitas mereka, maka kesadaran sebagai sekelompok orang yang disebut bangsa ini menguat yang pada batas tertentu melahirkan perlawanan.

Itulah yang terjadi pada masyarakat Papua yang oleh mereka disebut sebagai bangsa Papua di tanah Papua. Pemahaman atas elemen-elemen esensial-primordial tersebut yang kemudian melahirkan kesadaran sebagai bangsa Papua merupakan konstruksi yang berkembang sepanjang sejarah Papua. Memang tidak dipungkiri bahwa elemen-elemen esensial-primordial tersebut merupakan “warisan” dari para pendahulu mereka, tetapi bagaimana memaknakan warisan tersebut sehingga terbentuk perasaan “memiliki” atau “merasa milik mereka” merupakan sebuah konstruksi.

Bangsa Papua lahir sebagai produk dari kesamaan konstruksi atas elemen-elemen esensial-primordial yang meliputi sejarah, ras, wilayah geografis dengan berbagai sumber daya atau potensi alamnya, pola hidup yang membentuk kultur bersama dengan beragam suku, bahasa, agama atau religi, dan berbagai tradisi yang menampak pada berbagai simbol dan atribut kultural, yang kemudian melahirkan identitas bersama sebagai sebuah komunitas yang khas Papua dan dipahami sebagai warisan nenek moyang mereka dan dianggap sebagai milik bersama, baik secara individual maupun kolektif.

Ketika elemen esensial-primordial Papua diintervensi oleh orang-orang dari luar komunitas mereka secara berlebihan sehingga melahirkan ketimpangan dan marginalisasi yang kemudian menghilangkan identitas mereka sebagai bangsa Papua, maka nasionalisme Papua akan menguat dan melahirkan perlawanan.





Bagan 1. Konstruksi Mahasiswa tentang Bangsa Papua

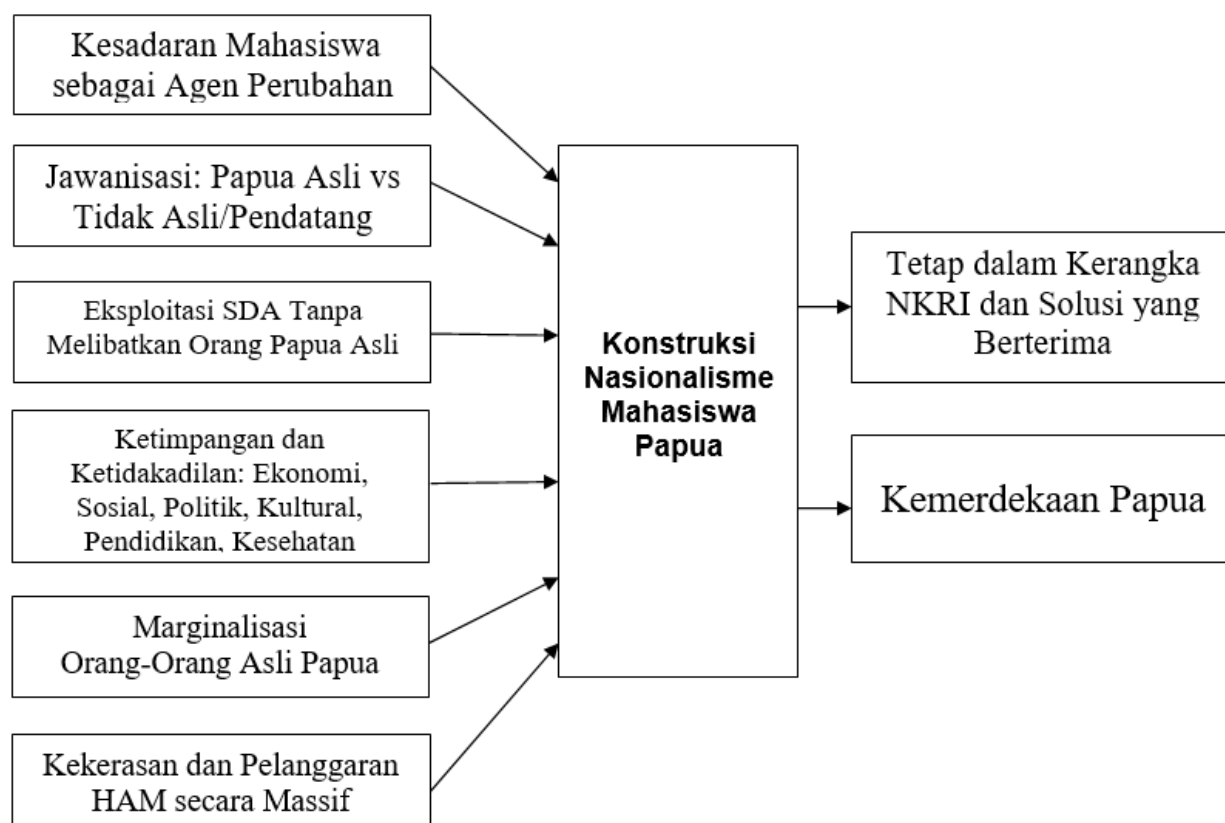
Kesadaran sebagai bangsa Papua dan berkembangnya nasionalisme Papua merupakan konstruksi yang berkembang sepanjang sejarah Papua. Terdapat tiga hal penting yang berkaitan dengan konteks sejarah tersebut, yaitu (a) penggunaan kembali nama Papua yang dianggap sebagai nama yang mewadahi identitas bangsa Papua yang bertolakbelakang dengan nama Irian Jaya yang dianggap sebagai pemberian Pemerintah Indonesia, (b) masa akhir kolonialisme Belanda sebagai persiapan kemerdekaan Papua, dan (c) masa Pepera yang dianggap kritis karena tidak mewakili keinginan seluruh rakyat Papua. Bagan 1 berikut menggambarkan konstruksi mahasiswa Papua tentang bangsa dan nasionalisme Papua.

## 2. Faktor Pendorong Berkembangnya Konstruksi Nasionalisme Papua

Berbagai faktor politik, ekonomi, dan kultural menjadi pendorong berkembangnya konstruksi nasionalisme Papua di kalangan mahasiswa asal Papua yang studi di Surabaya. Lahirnya konstruksi nasionalisme Papua, yang diyakini tidak hanya terjadi pada mahasiswa tetapi juga pada bangsa Papua, didorong enam hal berikut: (a) kesadaran bahwa mahasiswa adalah agen perubahan, (b) proses Jawanisasi Papua melalui migrasi, terutama transmigrasi masal, yang kemudian melahirkan dikotomi Papua asli dan tidak asli atau pendatang (c) eksploitasi sumber daya alam yang massif yang tidak melibatkan orang-orang asli Papua, (d) terjadi dan melebarnya

ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi, sosial, politik, kultural, dan pendidikan, (e) marginalisasi orang asli Papua melalui berbagai kebijakan, seperti transmigrasi massal dan penyebaran virus HIV/AIDS, dan (f) semakin massifnya kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap orang-orang asli Papua.

Kesadaran mahasiswa atas persoalan Papua, yaitu persoalan kesenjangan ekonomi, keterbelakangan sosial dan kultural, ketertinggalan pendidikan, dan militerisasi politik yang berujung pada kekerasan militer, melahirkan dua pandangan yang berbeda, yaitu (a) kesatuan Papua dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah



**Bagan 2: Faktor Pendorong Konstruksi Nasionalisme Papua**

keniscayaan sejarah yang harus diterima sehingga harus dicari jalan keluar yang bisa diterima kedua pihak dan (2) perjuangan kemerdekaan Papua dan pemisahan Papua dari Indonesia adalah harga mati.

Bagan 2 tersebut menggambarkan berbagai faktor yang mendorong berkembangnya konstruksi nasionalisme Papua yang kemudian menghasilkan dua pilihan, yaitu tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menuntut kemerdekaan Papua.

### **3. Makna: Reorientasi Kultural dan Pengembangan Papua Modern**

Nasionalisme Papua dan konsepsi bangsa Papua yang merupakan kontras dari nasionalisme Indonesia dan bangsa Indonesia, sangat berkaitan dengan makna nasionalisme tersebut bagi orang-orang Papua. Dalam konstruksi mahasiswa, makna nasionalisme Papua ini, setidaknya mencakup beberapa hal, yaitu (1) reorientasi kultural dan politik Papua, (2) pengakuan sejarah Papua, (3) pembangunan dari-oleh-untuk rakyat

Papua, (4) kesejahteraan ekonomi rakyat Papua, dan (5) pengembangan suasana sosial-kultural Papua yang modern. Reorientasi politik dan kultural di Papua akan bisa dilaksanakan bila negara hadir, bukan sekadar NKRI dengan legitimasi kesatuan berdasarkan panji-panji militer, tetapi negara kesatuan yang demokratis dengan mempertimbangkan, memperhatikan, dan mengembangkan budaya dan politik rakyat Papua sebagaimana tampak pada bagan 3.

### E. Penutup

Meski agak meluas, analisis atas persoalan bagaimana membangun wawasan kebangsaan Indonesia atau yang secara teoretik disebut nasionalisme Indonesia di tengah keragaman kultural dalam perspektif multikulturalisme dengan mengetengahkan persoalan keetnisan dan kebangsaan, pola pengembangan nasionalisme era orde baru, dan kasus Papua sebagai sebuah persoalan yang masih berlangsung, dapat dirumuskan beberapa tesis sebagai berikut.

1. Keragaman kultural sebagai bangsa-bangsa (*nations*) Indonesia adalah suatu keniscayaan yang terberi (*given*) sehingga perlu diterima sedemikian adanya, meliputi ras, wilayah geografis dengan berbagai sumber daya dan potensi alamnya, dan pola hidup yang membentuk kultur bersama dengan beragam suku, bahasa, agama atau religi, serta berbagai tradisi yang menampak pada berbagai simbol dan atribut kultural yang berkembang sepanjang sejarah (historikal) bangsa-bangsa di Indonesia.
2. Dengan keragaman tersebut, kebangsaan-negara-Indonesiaan kita bukan didasarkan pada kesatuan ras, etnis, religi, dan kultur, melainkan "hanya" dipersatukan oleh semangat dan tekad untuk bersama dan bersatu (Magnis-Suseno, 1998) yang tumbuh dan berkembang melalui

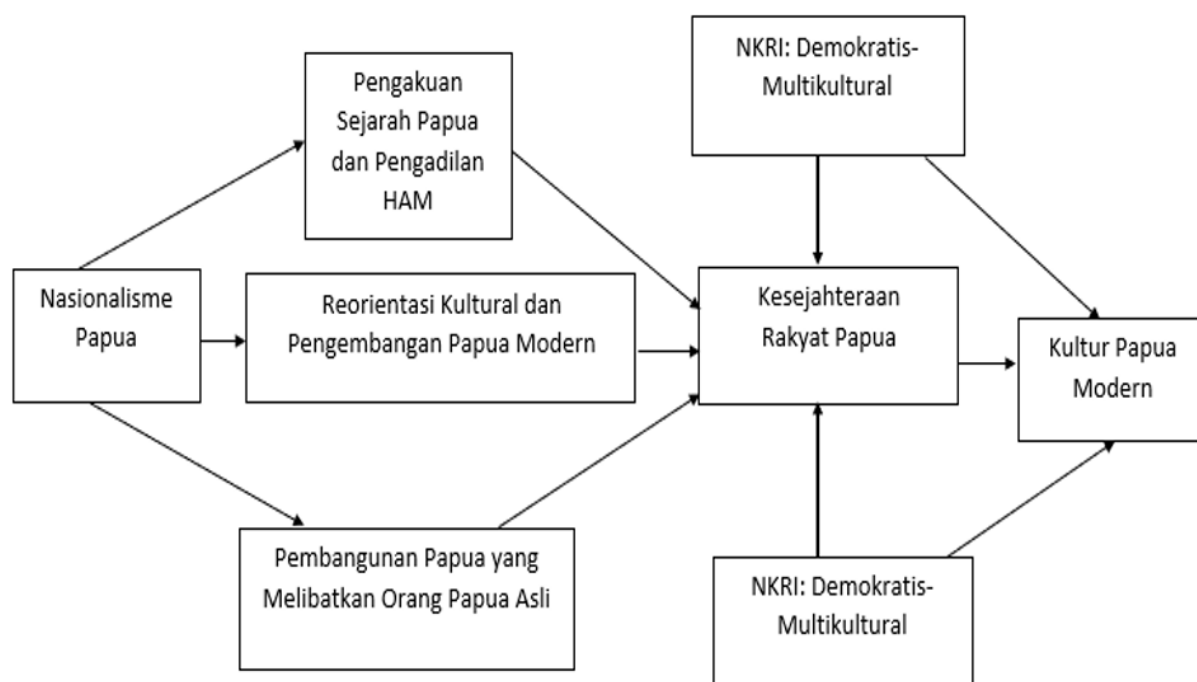
penciptaan simbol-simbol nasional Indonesia (Foulcher, 2000) dalam sejarah panjang pengalaman bersama yang sebagian merupakan sejarah penderitaan dan penindasan akibat kolonialisme yang kemudian melahirkan pengalaman perjuangan bersama demi kemerdekaan dan selanjutnya hidup dalam persatuan dan kesatuan dalam negara Indonesia yang merdeka dengan dasar Pancasila, konstitusi UUD 1945, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pola hubungan antaretnis, antarreligi, antarkultur, dan antarras yang secara dinamis terus-menerus berkontestasi dalam pergulatan individual dan sosial berkebangsa-negaraan yang diwarnai dengan persaingan, pertentangan, dan bahkan ketegangan adalah suatu keniscayaan pula sehingga diperlukan paradigma baru dalam memandang keragaman kultural dan relasi di dalamnya, bukan sebagai kelemahan atau bahkan ancaman, melainkan sebagai berkah kekuatan dengan warna-warni yang justru menghadirkan keindahan.
4. Pembangunan nasionalisme Indonesia yang dikembangkan pada masa orde baru dengan konsep negara integralistik yang menempatkan budaya daerah sebagai budaya "bawahan", sebagai unsur pembangun kebudayaan nasional yang lebih diagungkan yang kemudian ditampakkan dalam budaya peniruan melalui Taman Mini Indonesia Indah yang bisa ditafsirkan sebagai "penggambaran keragaman budaya dan

standar kepulauan Indonesia yang abadi dan sengaja dipisah-pisah ditampilkan sebagai unsur bawahan, tetapi terintegrasi dalam identitas dan budaya nasional yang lebih besar dan memegang kendali" (Elson, 2008) juga tidak menyelesaikan persoalan keindonesiaan yang multikultur.

5. Becermin dari kasus yang terjadi pada Papua dan mungkin kasus-kasus lain yang pernah dialami dalam sejarah perjalanan Indonesia pasca-kemerdekaan, perspektif multikulturalisme dalam mengembangkan nasionalisme Indonesia ke depan menjadi alternatif yang paling memungkinkan dengan memercayai bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *coexistence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain dalam kerangka menemukan kembali (*reinventing*) gagasan-gagasan yang lebih masuk akal tentang bagaimana

sebuah masyarakat majemuk di Indonesia ini dapat dikembangkan dalam sebuah konsepsi masyarakat “warna-warni” yang tidak saja berciri partisipatoris namun juga emansipatoris sehingga tidak sekadar berciri *coexistence* namun lebih pada *proexistence*. Melalui politik multikulturalisme ini, baik individu maupun kelompok-kelompok etnis, mampu menciptakan kembali diri dan belajar bagaimana memahami pengalaman ketertindasan dirinya dengan membaca dan mendengarkan narasi anggota kelompok yang lain.



Bagan 3. Makna Nasionalisme Papua

### Daftar Pustaka

Agger, Ben. 2006. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Allcoff, Linda Martin dan Eduardo Mendieta ed. 2003. *Identities: Race, Class, Gender, and Nationality*. UK: Blackwell Pub.

Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.

Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: INSIST Press.

Barker, Chris. 2013. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Cet. ke-8. Terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Beilharz, Peter and Trevor Hogan. (ed.). 2002. *Social Self, Global Culture: An Introduction to Sociological Ideas*. 2nd Ed. New York: Oxford University Press.

- Billig, Michael. 1995. *Banal Nationalism*. London: Sage Publications.
- Brubaker, R. 1996. *Nationalism Reframed*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Budhisantoso, S. 1996. "Kata Pengantar". Dalam Zulyani Hidayah. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Calhoun, C. 1997. *Nationalism*. Buckingham: Open University Press.
- Castells, M. 1997. *The Power of Identity*. Oxford: Blackwell.
- Cederman, Lars-Erik. 1999. "Theories of Nationalism". <http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/cederman/W99/p139-1/slide>. Diakses 08 November 2013.
- Connor, Walker. 1978. "A Nation is a Nation, is a State, is an Ethnic Group, is a ...". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Conversi, Daniele. 2006. "Mapping The Field: Theories of Nationalism and The Ethnosymbolic Approach". Dalam *Nationalisme and Ethnosymbolism*.
- Darsono. 2015a. "Construction of Nationalism on Papuan College Student in Surabaya in Multiculturalism Perspective". Dalam *American International Journal of Social Science*. Vol. 4, No. 4. August 2015.
- Darsono. 2015b. "Konstruksi Nasionalisme pada Mahasiswa Papua di Surabaya dalam Perspektif Multikulturalisme". Disertasi pada *Program Doktor Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga Surabaya*.
- Darsono. 2021. "Multiloyalty and New Nationalism in Indonesian Young Generation who Join Ethnic-Primordial Student Associations". In *ijournals: International Journal of Social Relevance & Concern (IJSRC)*. Volume 9 Issue 2 February, page 78—88.
- Dhakidae, Daniel. 2001. "Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa sebagai Komunitas-Komunitas Terbayang". Dalam Benedict Anderson. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: INSIST Press.
- Delanty, Gerard. 2001. "Nationalism: Between Nation and State". Dalam Ritzer, George dan Barry Smart, *Handbook of Social Theory*. London: SAGE Publ.
- Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln. ed. 2000. *Handbook of Qualitative Research*. Second edition. London: Sage Publications, Inc.
- Deustch, Karl W. 1966. "Nationalism and Social Communication". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Elson, Robert Edward. 2009. *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan*. Terj. Zia Anshor. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Farid, Hilmar. 1996. "Menemukan Bangsa, Mencipta Bahasa: Bahasa, Politik, dan Nasionalisme Indonesia". Dalam Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Feagin, Joe R. dan Clairece Booher Feagin. 1996. *Racial and Ethnic Reation*. Fifth ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Fearon, James D., Kimuli Kasara, dan David D. Laitin. 2007. "Ethnic Minority Rule and Civil War Onset". Dalam *The American Political Sciences Review*. Vol. 101, No. 1, Februari.
- Geertz, Clifford. 1963. "Primordial and Civic Ties". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.

- Gellner, Ernest. 1964. "Nationalism and Modernization". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Gellner, Ernest. 1983. *Nation and Nationalism*. Oxford: Basil Blackwell.
- Gellner, Ernest. 1997. *Encounters with Nationalism*. Oxford: Blackwell.
- Giddens, Anthony. 1985. "The Nation as Power-Container". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Gorski, Philip S. 2000. "The Mosaik Moment: An Early Modernist Critique of Modernist Theories of Nationalism". Dalam *American Journal of Sociology*, Volume 105, Number 5, March.
- Grosby, Steven. 2011. *Sejarah Nasionalisme: Asal Usul Bangsa dan Tanah Air*. Terj. Teguh Wahyu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Syamsul, dkk. 2007. *Disintegrasi Pasca-Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional*. Jakarta: CIREs FSIP UI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Haralambos, Michel and Martin Holborn. 2000. *Sociology: Themes and Perspectives* (fifth edition). London: Harper Collins Publishers Limited.
- Heffner, Robert W. ed. 2007. *Politik Multikulturalisme*. Terj. Bernardus Hidayat. Yogyakarta: Kanisius.
- Hidayah, Zulyani. 1996. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hobsbawm, E.J. 1992. *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*. Terj. Hartian Silawati. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hobsbawm, E.J. dan David J. Kertzer. "Ethnicity and Nationalism in Europe Today". Dalam *Anthropology Today*. Vol. 8, No. 1, February.
- Horsman, Mathew & Andrew Marshall. 1995. *After the Nation-State: Citizens, Tribalism, and New World Disorder*. London: HarperCollinsPublishers.
- Hutchinson, John. 1994. *Modern Nationalism*. London: Fontana.
- Hutchinson, John & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Hussain, Asifa dan William Lockley Miller. 2006. *Multicultural Nationalism: Islamophobia, Anglophobia, and Devolution*. Oxford: Oxford University Press.
- Kedourie, E. 1993. *Nationalism*. 4th.ed. London: Hutchinson.
- Kellas, James G. 1998. *The Politics of Nationalism and Ethnicity*. London: MacMillan Publishing Ltd.
- Kernerman, Gerald. 2005. *Multicultural Nationalism: Civilizing Difference, Constituting Community*. Toronto, Vancouver: The University of British Columbia.
- Koentjaraningrat, R.M. 1970. *Keseragaman dan Anekawarna Masyarakat Irian Barat*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat. 1993. *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta.
- Kohn, Hans. 1944. *The Idea of Nationalism: A Study in Its Origins and Background*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Edisi ke-2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Right*. Oxford: Clarendon.
- Leerssen, Joep T. 2005. "The Cultivation of Culture: Towards a Definition of Romantic Nationalism in Europe". *Working Paper European Studies Amsterdam*, Opleiding Europese Studies, Universiteit van Amsterdam.
- Lemert, Charles. 2001. "Multiculturalism". Dalam Goerge Ritzer dan Barry Smart. (ed.). *Handbook of Social Theory*. London: SAGE Publications Ltd.
- Leoussi, Athena S. (ed.). 2005. *Encyclopaedia of Nationalism*. New Brunswick (USA) dan London (UK): Transaction Publisher.
- Magnis-Suseno, Franz. 1998. *Mencari Makna Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, Frans. 2007. *Etika Kebangsaan, Etika Kemanusiaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Minogue, Kenneth. 2000. "Nationalism". Dalam Adam Kuper dan Jessica Kuper. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Edisi ke-2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muljana, Slamet. 2008. *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan*. Jilid I dan II. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Nairn, Tom. 1977. "The Maladies of Development". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Nairn, Tom. 1997. *Faces of Nationalism: Janus Revisited*. Verso.
- Oommen, T.K. 2006. "Nation and Nationalism in South Asia". Dalam Gerard Delanty dan Krishan Kumar (ed.). *The SAGE Handbook of Nation and Nationalism*.
- Oommen, T.K. 2009. *Kewarganegaraan, Kebangsaan, dan Etnisitas: Mendamaikan Persaingan Identitas*. Terj. Munabari Fahlesa. Bantul: Kreasi Wacana.
- Purwanto, Bambang. 2001. "Memahami Kembali Nasionalisme Indonesia". Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 4, No. 3, Maret.
- Renan, Ernest. 1882. "Qu'est-ce qu'une nation?" Terj. Ida Mae Snyder. Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Said, Edward W. 2010. *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur sebagai Subjek*. Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Purwo. 2001. "Merajut Kohesi Nasional: Etno-Nasionalisme dan Otonomi Daerah dalam Proses Demokratisasi". Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 4, No. 3, Maret.
- Satria, Riri. 2003. "Nasionalisme sebagai Antitesis Globalisasi". Dalam Tim (ed.) *Anak Bangsa Menggugat: Nasionalisme, Kemandirian, dan Kewirausahaan*. Jakarta: LP3ES.
- Sedyawati, Edi. 2008. *Keindonesiaan dalam Budaya*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Seton-Watson, Hugh. 1977. "Old and New Nations". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.
- Smith, Anthony. 1986. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Blackwell.
- Smith, Anthony. *National Identity*. Oxford: Penguin. 1991.
- Smith, Anthony. *Nations and Nationalism in the Global Era*. Cambridge: Cambridge University Press. 1995.

- Sparringa, Daniel T. *Discourse, Democracy and Intellectuals in New Order Indonesia: A Qualitative Sociological Study*. Ph.D. Thesis Flinders University (Mimeo).2007.
- Sparringa, Daniel T. "Multikulturalisme dari Pembiaran dan Koeksistensi Menuju Proeksistensi". Dalam *Diskriminasi di Sekeliling Kita: Negara, Politik Diskriminasi, dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Dian Institut.2008.
- Stalin, Joseph. "The Nation". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.1973.
- Weber, Max. "The Nation". Dalam John Hutchinson & Anthony D. Smith (ed.). 1994. *Nationalism*. New York: Oxford University Press.